



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IBRAHIM RASIMU
2. Jabatan : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
3. NHK : 504505

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 710.000.000

1. Tanah Seluas 1.311 m² di KAB / KOTA MUNA BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. Tanah Seluas 589 m² di KAB / KOTA MUNA BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
3. Tanah Seluas 300 m² di KAB / KOTA MUNA BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
4. Tanah Seluas 18.969 m² di KAB / KOTA MUNA, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
5. Tanah Seluas 589 m² di KAB / KOTA MUNA BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
6. Tanah Seluas 7.500 m² di KAB / KOTA MUNA BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
7. Tanah Seluas 7.500 m² di KAB / KOTA MUNA BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 218.500.000

1. MOTOR, YAMAHA SM/SOLO Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 8.500.000
2. MOBIL, TOYOTA RUSH 1,5 S M/T Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---



D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	100.824.235
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	1.029.324.235
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.029.324.235

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.